

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM MODEL DESA KONSERVASI DI TAMAN  
NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG**

*(Level of Community Participation in the Implementation of the Village Conservation Model Program in Bantimurung Bulusaraung National Park (Case Study of Labuaja Village, Cendrana Subdistrict, Maros Regency))*

**Muh. Nurhidayat<sup>1)</sup>, Amir Tjoneng<sup>2)</sup>, Saida<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Pascasarjana Agroekoteknologi Universitas Muslim Makassar

<sup>2)</sup>Dosen Pascasarjana Agroekoteknologi Universitas Muslim Makassar

<sup>2)</sup>Email [saida.saida@umi.ac.id](mailto:saida.saida@umi.ac.id)

**ABSTRACT**

*MUH.NURHIDAYAT. Level of Community Participation in the Implementation of the Village Conservation Model Program in Bantimurung Bulusaraung National Park (Case Study of Labuaja Village, Cendrana Subdistrict, Maros Regency) (guided by Amir Tjoneng and Hj. Saida)*

*This study aims, 1). Review the implementation process and problems faced in the Conservation Village Model Program around the Bantimurung Bulusaraung National Park area. 2). Assess the level of community participation in the Conservation Village Model Program around the Bantimurung Bulusaraung National Park area. 3). Formulate directions for improving the implementation of the Conservation Village Model Program around the Bantimurung Bulusaraung National Park area*

*The research was conducted in the buffer village of the Bantimurung Bulusaraung National Park conservation area, namely Labuaja Village, Cendrana District, Maros Regency, South Sulawesi Province. Field data collection, data processing and analysis as well as thesis preparation took place in February 2016 until May 2016. Data analysis was carried out qualitatively descriptive, namely data analysis based on oral statements arranged in expanded text. The data analyzed are data from interviews, field observations and documentation studies that have been stated in the notes.*

*The results of the study show that, the implementation process consists of 3 (three) stages namely; Planning stages, implementation stages and evaluation stages. The problem faced is that the target community does not understand the Village Conservation Model program. The level of community participation illustrates bahwa, community participation at the planning stage is only 11%, community participation at the implementation stage is only 20.49%, and community participation in the evaluation phase is only 20.49%. The direction for improvement in the implementation of the MDK is the Bantimurung Bulusaraung National Park Office to build collaboration with relevant agencies and Non-Governmental Organizations to encourage the issuance of regional regulations / regulations, improvement of supporting facilities and improving the quality and quantity of assistants to be able to build better business networks and partnerships and to coordinate with forest farmer groups and related agencies.*

**Keywords :** *Bantimurung Bulusaraung National Park; Model of Conservation Village*

**PENDAHULUAN**

Model Desa Konservasi adalah desa yang dijadikan sebagai contoh dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi dengan memfungsikan

kelembagaannya. Bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap kawasan, sehingga berdampak positif terhadap perlindungan, konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman

hayati kawasan konservasi itu sendiri. Model ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan konservasi, sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang juga telah melaksanakan program Model Desa Konservasi sejak tahun 2007. desa yang ditetapkan sebagai Model Desa Konservasi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah Desa Labuaja yang merupakan salah satu desa di daerah penyangga dalam wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Camba yang secara administratif pemerintahan berkedudukan di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan (Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, 2010).

Untuk dapat mewujudkan tujuan program Model Desa Konservasi dengan baik, maka dalam pelaksanaannya Kementerian Kehutanan menetapkan Sembilan tahapan yang harus dilaksanakan di semua Model Desa

Konservasi di Indonesia, yaitu : (a) membangun kesepahaman, (b) membangun/mengembangkan kelembagaan; (c) pelatihan keterampilan masyarakat, (d) pelaksanaan Partisipatori Rural Appraisal (penyusunan rencana desa secara partisipatif, (e) pengembangan ekonomi produktif); (f) pelatihan fasilitator / pendamping, (g) pelatihan Partisipatori Rural Appraisal bagi perangkat desa,(h) membangun kemitraan serta (i) monitoring dan evaluasi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengkaji proses pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam Program Model Desa Konservasi di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;
2. Mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Model Desa Konservasi di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;
3. Merumuskan arahan perbaikan pelaksanaan Program Model Desa Konservasi di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuaja, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu Model Desa Konservasi (MDK) di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai pada bulan Februari 2016 – Mei 2016.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data sekunder dan data primer, dengan metode studi literatur, wawancara langsung, baik dengan pengelola maupun masyarakat, terkait pelaksanaan Program Model Desa Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang dilaksanakan di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kab. Maros.

Tabel 1 Pelaksanaan penelitian mulai dari tahap perencanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi

No	Tujuan	Variable dan sub variable	Jenis Data	Sumber Data	Analisis Data
1	Mengkaji proses pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi	<p><b>1. Tahap perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kesepahaman (rapat koordinasi)</li> <li>Membangun dan mengembangkan kelembagaan (pembentukan kelembagaan, pengembangan kelembagaan, ketersediaan sarana sekretariat kelembagaan, ketersediaan perpustakaan, ketersediaan ATK)</li> <li>Menyiapkan tenaga pendamping</li> <li>Pelatihan PRA dan pelaksanaan PRA</li> </ul> <p><b>2. Tahap pelaksanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas masyarakat (pelatihan bidang KSDAE, penyuluhan/sosialisasi);</li> <li>Mengembangkan usaha ekonomi produktif (pengembangan usaha ekonomi produktif, insentif/permodalan/bantuan);</li> <li>Membangun kemitraan dan jejaring usaha (pertemuan dengan stakeholders, MoU/nota kesepahaman)</li> </ul> <p><b>3. Tahap monitoring dan evaluasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan teknis</li> <li>Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan pembangunan MDK</li> <li>Rincian kegiatan MDK</li> <li>Rencana kegiatan tahunan 2010-2015</li> <li>Kegiatan tahunan 2010-2015</li> <li>AD/ART Kelompok</li> <li>Data potensi desa</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan dan jenis sarana prasarana kelembagaan</li> <li>Jenis bantuan kepada masyarakat</li> <li>Wawancara tentang tahap-tahap MDK</li> </ul>	<p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung</li> <li>Kantor Pemerintahan Desa Labuaja</li> </ul> <p>Data primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung</li> <li>Koordinator perencanaan balai TN. Bantimurung Bulusaraung</li> <li>Pengendali Ekosistem Hutan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung</li> </ul>	<p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyajian data berupa data kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai TN. Bantimurung Bulusaraung di lokasi MDK</li> <li>Mengkaji kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan</li> </ul>

2.	Mengkaji tingkat partisipasi masyarakat	<p><b>1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam penggalan informasi)</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan data primer (potensi desa) dan data sekunder (kondisi umum, kependudukan)</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan</li> </ul> <p><b>2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam rapat koordinasi</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pelatihan dan penyuluhan/sosialisasi</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan dengan stakeholders</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan mitra</li> </ul> <p><b>3. Partisipasi masyarakat dalam tahap Monitoring dan evaluasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam bimbingan teknis</li> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam</li> </ul>	<p>Data primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara tahap perencanaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan kebutuhan masyarakat</li> <li>• Keaktifan masyarakat dalam pertemuan/rapat (kehadiran, usul, perumusan hasil)</li> </ul> </li> <li>2. Wawancara tahap pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Kritik dan saran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ul> </li> <li>3. Wawancara tahap evaluasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan dalam rapat evaluasi</li> <li>• Aspirasi yang disampaikan telah diakomodir atau belum</li> </ul> </li> </ol>	<p>Informan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat</li> <li>• Kepala Desa</li> <li>• LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi dari hasil wawancara</li> <li>• Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara</li> </ul>
----	---	--	---	--	---

		monitoring dan evaluasi			
3.	Merumuskan arahan pengembangan	variable dan sub variable pada tujuan 1 dan 2	data pada tujuan 1 dan 2	sumber data pada tujuan 1 dan 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis hasil pembahasan tujuan 1 dan 2</li> </ul>

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Proses analisis data secara deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama dilakukan dengan cara membuat ringkasan data dan membuat kerangka dasar penyajian data.
2. Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan Program Model Desa Konservasi

Pelaksanaan program model desa konservasi menggunakan 3 (tiga) tahapan, yakni: Tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Proses pelaksanaan program model desa konservasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

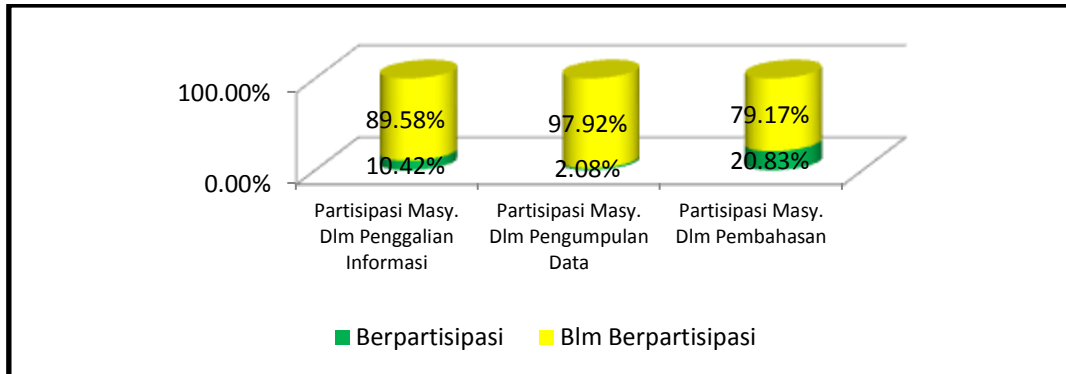
Tabel 2 Hasil penelitian pada tahap perencanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi

No.	Tahapan	Kondisi Saat ini
1	2	3
1.	Perencanaan MDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar pelaksanaan pelaksanaan program Model Desa Konservasi di TN. Babul adalah: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri;</li> <li>• Desa Labuaja sebagai Model Desa Konservasi;</li> <li>• Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Labuaja belum memiliki Sarpras yang memadai;</li> <li>• KTH-KTH belum memiliki lahan garapan yang jelas;</li> <li>• Pendamping/fasilitator yang ada terdiri dari: Fungsional Penyuluh 1 (orang) diperbantukan di kantor Balai TN. Bantimurung Bulusaraung, PEH (1 Orang) serta Polhut 2 (dua) orang;</li> <li>• Pelaksanaan sosialisasi Program MDK hanya dilaksanakan secara formal, baik di kantor Desa, maupun di Kantor Balai TN. Babul dan hanya melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat serta sebagian kecil masyarakat;</li> <li>• Pendamping/fasilitator (Fungsional Polhut dan PEH) belum memiliki kompetensi secara spesifik sebagai fasilitator lapangan;</li> <li>• Tingkat pendidikan masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani hutan masih rendah;</li> </ul>
2.	Pelaksanaan MDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA) belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>• Kelompok tani hutan belum memiliki Master plan kelompok;</li> <li>• Bantuan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan oleh Balai TN. Babul belum tepat sasaran;</li> <li>• Keterlibatan Instansi terkait, hanya sebatas menghadiri undangan, program-program dari instansi terkait belum bersinergi dengan program MDK</li> </ul>
3.	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan bimbingan teknis belum menjangkau seluruh anggota kelompok tani hutan;</li> <li>• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Balai TN. Babul dan sebagian kecil anggota kelompok tani hutan;</li> <li>• Kemitraan dan jejaring usaha masyarakat belum dikembangkan;</li> <li>• Masyarakat tidak memiliki akses untuk memperoleh modal usaha yang memadai;</li> <li>• Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal;</li> <li>• Tingkat pendidikan, akses teknologi serta kesejahteraan masyarakat masih rendah;</li> <li>• Masyarakat masih melakukan aktifitas ilegal logging, pembakaran lahan untuk pertanian dan perkebunan serta penggembalaan liar;</li> </ul>

## 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Model Desa Konservasi

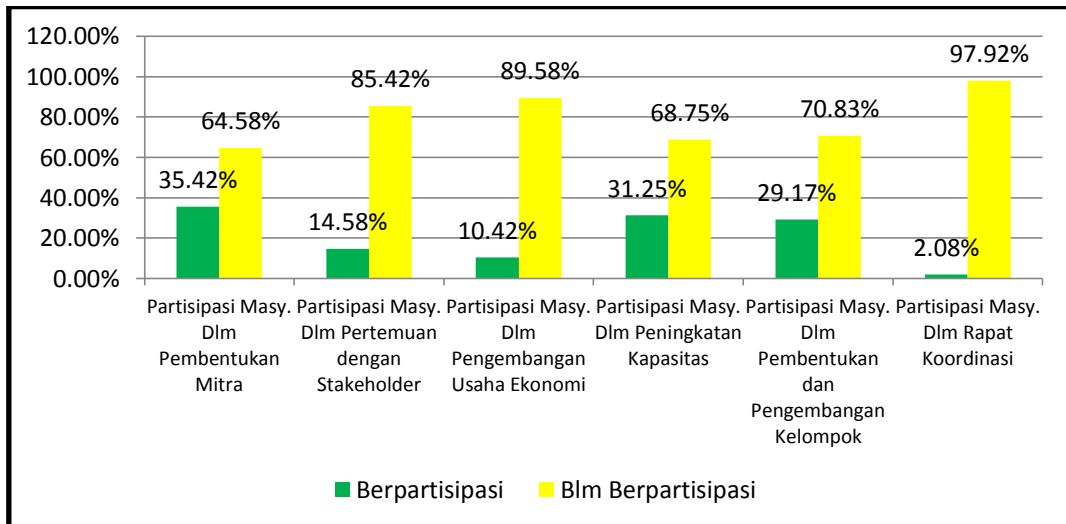
Tingkat partisipasi masyarakat yang diperoleh adalah :

### a. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan.



Jika dirata-ratakan, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan hanya sebesar 11 % (rendah)

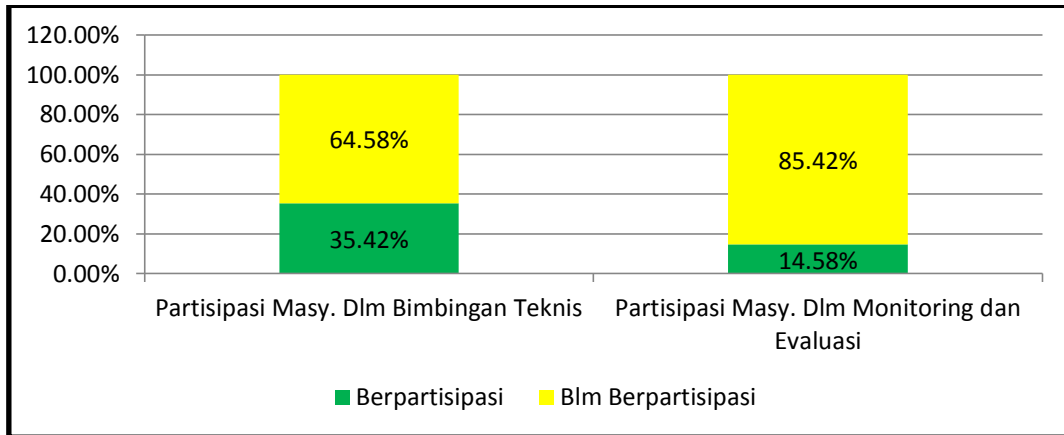
### b. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan



Jika dirata-ratakan, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan hanya sebesar 20,49% % (rendah)



c. Partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi



Jika dirata-ratakan, partisipasi masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi hanya sebesar 25% (rendah)

3. Arahan Perbaikan

Labuaja dapat dilihat pada table dibawah ini:

Arahan perbaikan dalam pelaksanaan model desa konservasi di Desa

Tabel 3 Arahan perbaikan dalam pelaksanaan model desa konservasi di Desa Labuaja

Arahan Perbaikan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai TN. Babul bersama Pemerintah Desa dan Instansi terkait lainnya, perlu mengupayakan diterbitkannya Petunjuk teknis (Juknis), Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Daerah (Perda) dll untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan MDK;</li> <li>Sarana dan Parasarana penunjang pelaksanaan MDK perlu ditingkatkan;</li> <li>Pembagaaian lahan garapan bagi KTH-KTH yang ada perlu diperjelas agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari;</li> <li>Sumber Daya Manusi pendampin/fasilitator perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya;</li> <li>Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program MDK, baik melalui kegiatan formal (sosialisasi, penyuluhan, pelatihan) maupun non formal perlu ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, instansi terkait serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuantitas pelaksanaan pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA) perlu ditingkatkan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat (minimal seluruh anggota KTH)</li> <li>Membantu KTH-KTH yang ada, untuk menyusun master plan (rencana kerja) kelompok sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;</li> <li>Perlu dibangun kolaborasi/kerjasama antara Balai TN. Babul dengan instansi terkait, demi kelancaran pelaksanaan MDK.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Balai TN. Babul bersama instansi terkai, mendorong pelibatan masyarakat dalam bimbingan teknis;</li> <li>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Balai TN. Babul dilaksanakan</li> </ul>

Arahan Perbaikan
bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakat (minimal seluruh anggota KTH); <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan jejaring usaha dalam rangka pemasaran produk masyarakat, agar mampu bersaing, baik dari segi harga maupun kualitasnya;</li><li>• Membangun komunikasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha, peningkatan pengetahuan dan keterampilan maupun pemanfaatan teknologi.</li><li>• Balai TN. Babul mensosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung</li><li>• Penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan hutan perlu dipertegas guna menciptakan efek jera bagi pelaku.</li></ul>

## KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan program Model Desa Konservasi.
  - a. Tahap perencanaan, telah memiliki dasar hukum sebagai acuan dalam pelaksanaannya, namun secara spesifik belum didukung peraturan daerah/peraturan desa, sarana dan prasarana bagi kelompok tani hutan belum memadai, pembagian lahan garapan belum jelas, fasilitator pendamping yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitas, serta tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga pelaksanaannya kurang optimal.
  - b. Tahap Pelaksanaan, Pelaksanaan pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA) sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program model desa konservasi belum menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, Kelompok tani hutan belum memiliki Master plan kelompok sebagai acuan pemberian bantuan dari Balai TN. Babul maupun instansi terkait lainnya, Instansi terkait belum terlibat secara rutin dalam pelaksanaan program model desa konservasi, hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak terakomodir dalam pemberian bantuan.

- c. Tahap monitoring dan evaluasi, Pelaksanaan bimbingan teknis belum menjangkau seluruh anggota kelompok tani hutan, hanya sebagian kecil anggota kelompok tani hutan yang terlibat, Kemitraan dan jejaring usaha masyarakat belum dikembangkan, pengetahuan masyarakat tentang teknologi masih minim serta masyarakat kurang memiliki akses untuk memperoleh modal usaha yang memadai, hal ini

- mengakibatkan masyarakat kurang memahami tahapan pelaksanaan program model desa konservasi, masyarakat tidak dapat mengembangkan usaha yang memiliki daya saing pasar.
2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Model Desa Konservasi
    - a. Partisipasi pada tahap perencanaan sangat rendah karena sosialisasi program sangat minim, hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat saja, hal ini menjadi penyebab masyarakat kurang berminat untuk ikut berpartisipasi;
    - b. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan juga rendah karena Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak pengelola (Balai TN. Babul) maupun yang dimiliki instansi terkait lainnya, baik tenaga fungsional penyuluh kehutanan/pertanian/perkebunan, fungsional Pengendali Ekosistem Hutan maupun Fungsional Polisi Kehutanan sebagai ujung tombak ditingkat tapak (desa/kelurahan) masih sangat minim, baik kualitas maupun kuantitasnya.
    - c. Partisipasi masyarakat tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan MDK Desa Labuaja juga hanya
  3. Arahan perbaikan pelaksanaan program Model Desa Konservasi
    - a. Tahap perencanaan, Balai TN. Babul selaku pengelola Program MDK perlu mengupayakan/mendorong diterbitkannya Juknis pelaksanaan Program MDK, Perda/Perbup serta Perdes pendukung program, agar pelaksanaan program MDK dapat berjalan secara terstruktur dan terukur, guna memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan;
    - b. Tahap Pelaksanaan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyusunan rencana program, pihak pengelola membangun kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan program.
    - c. Tahap monitoring dan evaluasi, memberikan bimbingan teknis dan melibatkan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program model desa konservasi.
- sebesar 25% (rendah), hal terjadi karena masyarakat kurang memahami konsep dan tujuan dari program MDK serta kurang dilibatkan dalam pelaksanaan monev itu sendiri.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung beserta jajarannya, kepala Desa Labuaja serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data-data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Ichwan K. 2012. Analisis Kompensasi Tanaman Masyarakat di dalam Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Sulawesi Selatan (*Studi Kasus Pak Patu*)
- Sabir, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam melakukan Konservasi Tanah dan Air secara berkelanjutan di Daerah Penyangga Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
- Safiudin, 2014. Analisis alih fungsi hutan dan potensi terjadinya degradasi lahan di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan
- Yelin Adalina, 2014. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, Jawa Barat
- Desi Indrasari, 2016. Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung Di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah
- Ratu Paska, 2016. Model Pengelolaan Kolabortif Taman Wisata Alam Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur
- Usman, 2017. Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung di Provinsi Sulawesi Selatan
- Adiwibowo, et al. 2008. Analisis Isu Pemukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia. Sajogyo Institute dan Gunung Halimun-Salak National Park Management Project JICA. Bogor
- Agung S. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. CSF. Kalimantan
- Alive, 2009. Menuju Desa Konservasi : Manusia dan Alam Dalam Harmoni Kehidupan. (<http://www.alivefp3.org>, diakses 13 Juli 2010).
- Arinal. 1999. Program Kemitraan dalam Membangun Taman Nasional. Makalah disajikan dalam Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat melalui Strategi Kemitraan. Jember 1 September 1999.
- Balai TN. Bantimurung Bulusaraung, 2016. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2016-2025. Maros.
- Cohen, J.M. and Norman T. Uphoff, 1977. Rural Development Participation. Cornell University Press. Ithaca.
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. UGM Press. Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan RI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan RI. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Departemen Kehutanan RI. 2010. Term of Reference (TOR) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan

- Konservasi Melalui 9 Tahapan. Bogor.
- Fachruddin. 1996. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.*
- Fatoni. 2004. *Tingkat dan Manfaat Partisipasi dalam Program Pengembangan Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala).* Tesis tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hikmat H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Humaniora Utama Press (HUP). Bandung.
- Khazali dkk. 2002. *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Mangrove (Studi Kasus di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat).* *Jurnal Pesisir dan Lautan (Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources)* Vol. 4 No. 3
- Kuncoro M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Erlangga. Jakarta.
- MacKinnon J.K, G. Child, J. Thorsell. 1993. *Managing of protected areas in the tropics.* Hari Harsono Amir, penerjemah: *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika.* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Mardi Y. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi.* Pokok Pikiran pada Seminar Sehari Pemberdayaan yang diselenggarakan Bappenas, 6 Maret 2000. Jakarta.
- Mubyarto. 1994. *Desa dan Perhutanan Sosial.* Yogyakarta: Adikarya Media.
- Munggoro, Dani Wahyu. 2001. *Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria dan Indikator.* Pustaka Latin. Bogor.
- Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Pretty, J.N. 1995. *Participatory Approach,* JICA International Training on PLSD: Theories and Practices. CIBIC. Nagoya.
- Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 2005. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Edisi 4.* Makassar.
- Pusat Informasi Kehutanan. 2009. *Siaran Pers : Model Desa Konservasi (MDK) Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi.* (<http://www.dephut.go.id>, diakses 9 Mei 2010).
- Rahardjo B. 2003. *Studi Banding Internasional Model Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi.* Bogor: Latin.
- Rustiadi, Ernani dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.* Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Said, Adri dkk. 2002. *Participatory Local Social Development Planning (PLSDP) Modul IV : Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Lokal Secara Partisipatif.* PSKMP-UNHAS. Makassar.
- Salman, Darmawan. 2005. *Pembangunan Partisipatoris.* PSKMP-UNHAS. Makassar.
- Sawitri, D. 2007. *Peranan dan Potensi Manusia Dalam Keberhasilan Pengembangan Wilayah Berbasis Sumberdaya Lokal.* Disertasi. ITB. Bandung
- Setiamiharja. 1993. *Potensi dan Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Upaya Konservasi Alam.* Bandung: INRIK UNPAD.
- Setyadi, I.A. 2008. *Kebijakan Pengembangan MDK di Sekitar/Dalam Kawasan*

- Konservasi. Makalah disajikan dalam Pertemuan Rutin Working Group Pemberdayaan, Departemen Kehutanan RI, Bogor, 25 Juli 2008.
- Soewardi, Herman. 1978. Menyongsong Kehadiran Taman Nasional di Indonesia. Ditjen PPA.
- Stolton, Sue dan Dudle Nigel. 1999. Partnership for Planning and Management for Protected Areas. WWF.IUCN.Earthscan Publication Ltd. London.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Tahir, Muhammad., M. Arief., Ishak Salim., dan Andrie. 2005. Melembagakan Wawasan Konservasi dalam Pemerintahan Desa. Care International Indonesia. Central Sulawesi. Palu.
- Wibowo, Soetino. 2006. Rehabilitasi Hutan Pasca Operasi Illegal Logging. Wana Aksara. Banten.
- Wiratno., Daru, Indriyo, A. Syarifudin dan Ani, Kartikasari. 2001. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia dan PILI – NGO Movement. Bogor.
- Yin, Robert.K. 2003. Studi Kasus, Desain dan Metode. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zain AS. 1997. Kamus Kehutanan. Rineka Cipta. Jakarta.